

**OPTIMALISASI CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK) DI BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh
Venia Tri Nabilla
NIM. 07011382126177**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**OPTIMALISASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK) DI BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Diajukan Oleh:

VENIA TRI NABILLA

NIM. 07011382126177

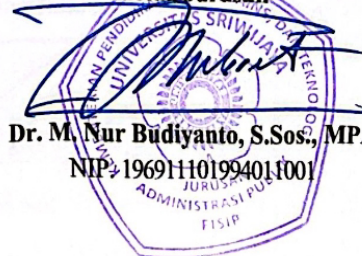
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 09 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
OPTIMALISASI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK) DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 19 Mei 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Martina, M.Si
Ketua



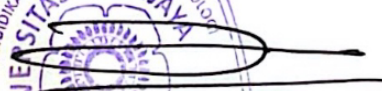
Drs. Mardianto, M.Si.
Anggota



Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Venia Tri Nabilla
NIM : 07011382126177
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 10 Maret 2004
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat daerah Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan Etika Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 09 Mei 2025



Venia Tri Nabilla

07011382126177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ If I do right I will do it again, if I do wrong I never do it again ”

(Venia, 2025)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua dan Nenek Tercinta.
2. Kakak Perempuan, Kakak Laki-laki dan Adik Laki-laki Tersayang.
3. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2021.
4. Almamater Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang” Hal yang melatarbelakangi penelitian ini yakni kurangnya kelengkapan informasi dalam penyajian data yang ada di CALK, Informasi yang disajikan sulit dipahami yakni dibuat menggunakan format yang berbeda dari sebelumnya, Keterbatasan SDM dalam penyusunan menjadi faktor terhambat optimalnya CALK itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Optimalisasi menurut Winardi (Ali 2014) dengan indikator yang ditinjau yakni Efektifitas dan Efisiensi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan pengelolaan CALK di bagian Perencanaan dan Keuangan sudah cukup optimal dan sudah memenuhi standar transparan dan juga akuntabel. Pengelolaan CALK sudah dibuat sesuai dengan SAP sehingga mengurangi terjadinya manipulasi laporan keuangan tetapi masih kurangnya SDM dalam penyusunan CALK sehingga membuat proses penyusunan membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan untuk menyelesaikannya. Dalam CALK sendiri rincian yang disajikan sudah cukup informatif dan jelas jika diukur menggunakan standar yang diberikan oleh pemerintah, BPKAD merupakan penghubung komunikasi (mediasi) secara langsung kepada OPD untuk menyusun laporan keuangan yang baik dan relevan seperti apa dan pihak yang bersangkutan dan selalu membuka ruang untuk bertanya khususnya bagi pegawai yang belum mengerti atau kebingungan dengan menggunakan metode jemput bola dan lebih proaktif. Penulis dapat memberikan rekomendasi berupa peningkatan kompetensi SDM seperti mengadakan pelatihan khusus kepada pegawai, Optimalisasi sistem informasi keuangan agar menghasilkan data yang akurat dan pengawasan evaluasi secara berkala.

Kata Kunci: Optimalisasi, Sekretariat Kota Palembang, Efektifitas, Efisiensi.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Optimization of Financial Statement Notes (CALK) in the Planning and Finance Section of the Palembang City Regional Secretariat" The background of this research is The problems that occur in the field are the lack of complete information in presenting data in CALK, the information presented is difficult to understand, namely it is made using a different format than before, the limited human resources in the preparation are a factor that hinders the optimal CALK itself, CALK in the Planning and Finance section is still made manually due to the lack of utilization of information technology. This research was conducted in the Planning and Finance Section of the Palembang City Regional Secretariat. The theory used in this study is the Optimization Theory according to Winardi (Ali 2014) with the indicators reviewed, namely Effectiveness and Efficiency, This study uses a qualitative method. Based on the results of the research analysis that has been carried out, the management of CALK in the Planning and Finance section is quite optimal and has met transparent and accountable standards. CALK management has been made in accordance with SAP so that it reduces the occurrence of financial report manipulation but there is still a lack of human resources in the preparation of CALK so that the preparation process takes an uncertain time to complete. For example, for the purchase of goods and services In CALK itself, the details presented are quite informative and clear when measured using the standards provided by the government, BPKAD is a direct communication link (mediation) to OPD to prepare good and relevant financial reports such as what and interested parties and always open space to ask questions, especially for those who do not understand or are confused by using the jemput bola method and being more proactive., The author can provide recommendations in the form of improving HR competencies such as holding special training for employees, Optimizing financial information systems to produce accurate data and periodic evaluation supervision.

Keywords: *Optimization, Palembang City Secretariat, Effectiveness, Efficiency.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Optimalisasi “Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang” dengan baik tanpa halangan tertentu guna menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak- pihak yang terkait itu di antaranya sebagai berikut :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua Orang tua, Nenek, Kakak Perempuan, Kakak Laki-laki dan Adik Laki-laki yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan selama kuliah hingga menyelesaikan Skripsi ini.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Dr. Martina, M. Si selaku Dosen Pembimbing Magang dan sekaligus Dosen Pembimbing untuk Skripsi yang selalu memberikan saran selama proses penyusunan laporan dan usulan skripsi.
9. Ibu Adesty selaku Staf Administrasi kampus Palembang yang selalu membantu penulis dalam pengadministrasian kampus.

10. Kepada Seluruh Pegawai Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Terima kasih atas waktu dan izin kepada penulis untuk melakukan Magang Empat bulan dan melakukan penelitian.
11. Teman – teman dan pihak - pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya tapi mereka turut andil dalam memberikan dukungan terbaik selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis tidak bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik tanpa kebaikan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan terbaiknya. Skripsi ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, 09 Mei 2025

Venia Tri Nabilla
NIM.07011382126177

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat.....	11
1.4.1 Manfaat Praktis.....	11
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2 Optimalisasi.....	14
2.3 Optimalisasi Keuangan dan Optimalisasi Manajemen Keuangan.....	16
2.4 Elemen Optimalisasi.....	16
2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	18
2.6 Sistem Pencatatan Laporan Keuangan.....	19
2.7 Teori yang Digunakan.....	21

2.8 Penelitian Terdahulu.....	21
2.9 Kerangka Berfikir.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Variabel Penelitian.....	33
3.2.1. Definisi Konseptual.....	33
3.2.2. Fokus Penelitian.....	34
3.3. Unit Analisis Data.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5. Penentuan Informan (Key Informant).....	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
3.8 Teknik Pemeriksa Keabsahan.....	41
BAB IV.....	42
PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	42
4.1.2 Logo Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	43
4.1.3 Profil Bagian Perencanaan & Keuangan Setda Kota Palembang.....	45
4.1.4 Logo Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Palembang.....	46
4.1.5 Visi dan Misi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	46
4.1.6 Struktur Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	47
4.1.7 Bagian Perencanaan & Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	48
4.1.8 Tugas – Tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	50
4.2 Informan penelitian.....	51
4.3 Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	52

4.4 Pembahasan.....	62
4.4.1 Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	62
4.4.2 Efektifitas.....	63
4.4.3 Efisiensi.....	67
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	6
Tabel 1.2 Spesifikasi Bagian Pengelolaan Laporan Keuangan.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Informan.....	36
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Realisasi Pendapapatan Anggaran.....	55
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Daaerah.....	56
Tabel 4.4 Matriks Temuan Penelitian.....	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	39
Gambar 4.1 Logo Setda Kota Palembang.....	43
Gambar 4.2 Logo Kota Palembang.....	43
Gambar 4.3 Logo Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	46
Gambar 4.4 Struktur Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	79
Lampiran 2. Matriks Wawancara Transkrip.....	81
Lampiran 3. Dokumentasi.....	86
Lampiran 4. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	89
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	92
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	93
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
Lampiran 9. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	95

DAFTAR SINGKATAN

1. CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan
2. LRA : Laporan Arus Kas
3. LAK : Laporan Arus Kas
4. SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
5. SDM : Sumber Daya Manusia
6. SETDA : Sekretariat Daerah Kota Palembang
7. SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah
8. SIPD : Sistem Informasi Pemerintah Daerah
9. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
10. WDP : Wajar Dengan Pengecualian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem laporan keuangan di Indonesia. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palembang. Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2014 ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Untuk Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa SAPD diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palembang mencakup pilihan prosedur dan teknik akuntansi untuk mengidentifikasi transaksi, mencatat dalam jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, serta menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah salah satu cara bagi entitas, dalam hal ini pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat, sehingga pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas. Pemerintah pusat maupun daerah memerlukan perubahan di bidang akuntansi pemerintahan dikarenakan

melalui sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Maka dari itu, perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP (Langelo dkk, 2015). Melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan ini menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat dan daerah.” Pengawasan internal mencakup seluruh proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas pengawasan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan memberikan kepastian yang cukup bahwa aktivitas telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara efektif dan efisien untuk kepemimpinan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota diwajibkan untuk melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintah agar pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Simatupang (2017) menemukan

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari langkah-langkah mulai dari pengumpulan data hingga laporan keuangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan APBD (Pemendagri No.59 Tahun 2007). Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan fungsional. Iskandar (2015) menemukan bahwa pengawasan fungsional memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini juga dinyatakan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Penelitian ini hanya difokuskan pada pembahasan mengenai penggunaan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Sinaga (2011) menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. IAI (2004) menambahkan pula bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara ekonomis. Setiap pos dalam neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Huang et al, 1999 dalam Xu et al, 2003).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang berakar dari kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan yang baik tidak hanya menjadi alat untuk melaporkan hasil, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja instansi. Permasalahan yang terjadi di lapangan yakni kurangnya kelengkapan informasi dalam penyajian data yang ada di CALK, Informasi yang disajikan sulit dipahami yakni dibuat menggunakan format yang berbeda dari sebelumnya, Keterbatasan SDM dalam penyusunan menjadi faktor terhambat optimalnya CALK itu sendiri, CALK di bagian Perencanaan dan Keuangan masih dibuat secara manual karena kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. CALK berperan penting dalam menyajikan informasi tambahan yang menjelaskan angka-angka dalam laporan keuangan, memberikan konteks yang diperlukan untuk analisis yang lebih efektif. Dengan kompleksitas anggaran yang semakin meningkat, diperlukan catatan yang terstruktur dan jelas agar semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan. Masalah laporan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Palembang terlihat jelas dari penurunan opini audit yang diterima, yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun sebelumnya menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya indikasi pengaturan harga dalam pengadaan barang, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek yang mengakibatkan

kekurangan volume pekerjaan dan pengawasan yang tidak memadai. Selain itu, klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak tepat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi sorotan. Meskipun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, masih terdapat kendala seperti kesulitan akses ke server dan kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, tantangan dalam implementasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah masih perlu ditangani secara serius agar kualitas laporan keuangan dapat meningkat di masa mendatang. Selain itu, pengelolaan yang efisien dan efektif sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Optimalisasi CALK akan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, serta memberikan wawasan yang berguna dalam perencanaan anggaran ke depan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola yang baik dan berorientasi pada hasil, di mana setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara berkala. Dengan memanfaatkan CALK secara optimal, diharapkan Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat meningkatkan kinerja instansi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berikut jumlah pegawai yang ada di bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang

Nama Bagian	Jumlah Pegawai
Bagian Perencanaan dan Keuangan	17
Bagian Akuntansi dan Pelaporan	13
Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi	16
Total Pegawai	46

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Tahun 2025

CALK sendiri di Bagian Perencanaan dan Keuangan dikelola langsung oleh bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 1.2 Spesifikasi Bagian Pengelolaan Laporan Keuangan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan	
Kasubag Pelaporan	1
Pengelola Laporan Keuangan Daerah	4
Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah (Pembuatan CALK)	1
Analisis Laporan Keuangan	2
Staf biasa Pelaporan	5
Total	13

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, Tahun 2025

Di sisi lain, ketidakadaan laporan keuangan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Tanpa laporan tersebut, transparansi berkurang, masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan, yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Selain itu, pemimpin daerah akan kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan dan

penganggaran, berpotensi mengarah pada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kurangnya laporan keuangan juga mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Terakhir, proses manual dalam pengelolaan keuangan tanpa adanya laporan formal meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan potensi penipuan karena tidak adanya sistem pengawasan yang memadai. Dengan demikian, laporan keuangan di Setda Kota Palembang merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Melihat fenomena yang terjadi di bagian perencanaan dan keuangan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan usaha bagi para staff dan pegawai lainnya dalam mengoptimalkan hasil laporan keuangan yang baik, Sehingga data yang disajikan dalam CALK bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratan datanya.

Penelitian terkait Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan di bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang telah banyak dilakukan. Seperti penelitian oleh Rheno Arya Saputra, Farid Darmawan, Muh. Gibran Abdiel A (2021) berjudul Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2018-2019 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil analisis yang diharapkan yakni dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2018-2019.

Penelitian terkait oleh Elfiane Sindi Kapantow Kapantow, Herman Karamoy, Peter M Kapojos (2023) berjudul Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif dan menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 khususnya PSAP nomor 04 tentang pencatatan atas laporan keuangan sudah sesuai dan sudah berbasis akrual.

Penelitian terkait oleh Yogie Andriana Rachman yang berjudul Pengaruh pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan penggunaan laporan keuangan daerah terhadap capaian kinerja instansi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung (2020) menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menghasilkan secara simultan pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan penggunaan laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja instansi.

Penelitian terkait dilakukan oleh Rozitari Gita berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Koperasi Bahrul Ulum Kijang (2020) menggunakan Teori menurut (Rumengan, 2013) yaitu studi deskriptif hanya menggambarkan satu parameter tertentu tanpa mempermasalahkan apa, bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi penelitian ini hanya memotret fakta apa adanya, kemudian disajikan sebagai sebuah laporan penelitian yang memakai prosedur dan standar keilmuan tertentu.

Penelitian terkait dilakukan oleh Dewi Rahmasari dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan total aset terhadap opini audit dengan tingkat pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan kementerian/lembaga sebagai variabel *intervening* (2017) yang menggunakan teori oleh (Haryono, 2017) bahwa analisis jalur merupakan pengembangan lebih lanjut dari regresi berganda dan

bivariate. Analisis jaluringin menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel *exogen* dan *endogen* sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel *mediating/intervening*. Hasil pengujian menggunakan software amos versi 22 membuktikan bahwa SPI, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dan tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK.

Penelitian tentang Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) di bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang sangat penting karena dapat membantu memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan menganalisis CALK, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan peraturan dan efisien, serta mengidentifikasi potensi pemborosan atau kebocoran anggaran. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak berwenang. Melalui penelitian ini, perencanaan anggaran bisa lebih ditingkatkan agar lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.

Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi. Dalam menyusun anggaran pemerintah harus lebih matang serta dalam proses pelaksanaan/kegiatan anggaran menjadi sistematis agar realisasi pencapaian anggaran terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal

ini kedepannya berdampak baik yaitu tidak terjadi pergeseran anggaran ketika dipertengahan pelaksanaannya. Serta untuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan anggaran diharapkan adanya peningkatan kelengkapan dan penyediaan data/informasi yang terbaru guna menunjang kualitas perencanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat Kota Palembang, terutama dalam hal rincian pengeluaran dari tahun 2021 hingga 2023, yakni dengan menerapkan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan transparan, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang telah digunakan sejak tahun 2022. SIPD dapat membantu dalam pengelompokan data dan pengkodean yang lebih efisien, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengeluaran.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan di bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kota Palembang.?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam CALK akurat dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Informasi yang lebih akurat dan transparan dari CALK memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih rasional dan efisien.
2. Optimalisasi ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat. Dengan pemantauan kinerja yang lebih baik, instansi dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerja keuangan secara cepat jika terdapat penyimpangan dari rencana. Transparansi dalam CALK juga meningkatkan akuntabilitas, memungkinkan instansi mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pihak berwenang.
3. Data yang disajikan membantu merumuskan rencana strategis yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Proses ini juga mendukung pengembangan sistem pengendalian internal yang lebih baik, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) memiliki hubungan penting dengan administrasi publik, yakni CALK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan pengungkapan informasi yang lebih detail, memungkinkan publik dan pemangku kepentingan untuk memahami penggunaan dana publik serta mendorong partisipasi dalam pengawasan.
2. Optimalisasi CALK dapat memperdalam pemahaman tentang pengendalian internal dan manajemen risiko. Dalam teori manajemen, pengendalian yang efektif penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan dalam

pengelolaan anggaran, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Dari perspektif teori perencanaan strategis, optimalisasi CALK membantu dalam penyusunan rencana yang lebih terarah dan berbasis analisis. Data yang disajikan dalam CALK memungkinkan instansi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan secara lebih efektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan strategis yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, S. (2008). *Metode penelitian. Pustaka Setia*: Bandung.
- K. Kasomtijo. (2017). “*LKP : Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan pada PT Abdael Nusa Surabaya,*” Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
- Ria, K. A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif. Buku Ajar Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Ahmad Dahlan.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.*

Internet

- Dewi, J., Ningtyas, A., Pd, S., Si, M., & Pusmanu, P. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1(2), 11-17. Dari <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/28> diakses 10 Desember 2024 pukul 10.00 AM.
- Istinasari, C., Gele, E., Diah, N., Stie, A., & Surabaya, M. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Sebagai Sistem Pengembangan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Umkm Fedcacare). *Media Mahardhika*, 19(3), 599-607. Dari <https://doi.org/10.29062/mahardika.v19i3.284> diakses 12 November 2024 pukul 17.21 PM.
- Kapantow, E. S., Karamoy, H., Kapojos, P. M. (2023). Implementation Of Accountability Notes On Financial Statements Based On Statement Of Governmental Accounting Standards No. 04 At The Tourism Office Of North Sulawesi Province. *Jurnal EMBA*, 11(02), 494–505. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/48676/42976> diakses 17 Desember 2024 pukul 19.56 PM.
- Lintong, J.S., Limpeleh, E.A.N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101. Dari <https://dx.doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597> diakses 14 Desember pukul 15.21 PM.

- Lumingkewas, V. A. (2013). Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut. *Jurnal EMBA*, 1(3), 199–206. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1647> diakses 15 Desember 2024 pukul 13.18 PM.
- Ningsih, N. H., & Welly. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) oleh Pengguna Laporan Keuangan Daerah di OPD Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(2), 255–266. Dari <https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1178> diakses 29 November 2024 pukul 11.30 AM.
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (2023). Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022: Catatan atas laporan keuangan. Kabupaten Bondowoso: Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dari <https://bondowosokab.go.id/uploads/IPKD/2022/28.%20Informasi%20Penetapan%20Perda%20Ptgjbwan%20Pelaksanaan%20APBD%20TA%202022.pdf> diakses 9 Desember 2024 pukul 13.14 PM.
- Permana, K. W. A. (2021). Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 5(1), 1–16. Dari <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/211/126> diakses 25 November 2024 pukul 12.15 PM.
- Prasetyo, R. D., & Utami, L. A. (2022). Sistem Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Biro Perencanaan Dan Keuangan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Berbasis Web. *IJIS: Indonesian Journal on Information System*, 7(2), 90–99. Dari <https://ijiswiratama.org/index.php/home/article/view/197/91> diakses 16 November 2024 pukul 09.45 AM.
- Rahayuningsih, S., Maria, M., & Amri, D. (2022). Determinan kualitas laporan keuangan Kota Palembang. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 90–95. Dari <https://doi.org/10.57141/kompeten.v1i3.22> diakses 12 Desember 2024 pukul 10.00 AM.
- Saputra, R. A., Darmawan, F., & Abdiel, M. G. A. (2023). Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2018. *MUSYTARI: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2(8). Dari <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359> diakses 17 Desember 2024 pukul 11.33 AM.
- Tinungki, A. N. M., Pusung, R. J. (2014). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal EMBA*, 2(2), 809–819. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4417> diakses 13 Desember 2024 pukul 15.18 PM.

- Widiastiawati, B., & Hambali, D. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Sari Bunga. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 38–48. Dari <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/500> diakses 21 November 2024 pukul 16.20 PM.
- Widiastoeti, H., & Sari, C.A.E. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak-Emkm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya. *Jurnal Ekbis: Analisis, Prediksi, dan Informasi*, 21(1), 1-15. Dari <https://doi.org/10.30736/je.v21i1.319> diakses 27 Desember 2024 pukul 10.44 AM.